

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : ASPEK KEPENTINGAN UMUM DAN DASAR
PENETAPAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DALAM
PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Ketua Peneliti : Lina Hastuti
Anggota Peneliti : Urip Santoso
Sumardji
Agus Yudha Hernoko
Tatiek Sri Djatmiati

Fakultas/Puslit : Hukum/Universitas Airlangga
Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas
Universitas Airlangga Tahun 1992/1993
SK Rektor Nomor : 5186/PT.03.H/N/1992
Tanggal : 6 Juli 1992

Isi Ringkasan

Pesatnya pembangunan di Kotamadya Surabaya saat ini membawa konsekwensi makin banyak diperlukan tanah sebagai sarana dan prasarananya. Tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sangat terbatas luas dan jumlahnya yang secara langsung dikuasai oleh Negara, dan tanah-tanah yang ada itu hampir semuanya dimiliki atau dikuasai oleh rakyat. Oleh karena itu yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pembebasan hak atas tanah.

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah di antaranya adalah belum adanya kesatuan pandangan mengenai kriteri kepentingan umum maupun dasar penetapan besarnya ganti kerugian.

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kriteria apa yang digunakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam menentukan pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum ?
- b. Dasar penetapan apa yang digunakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam menetapkan besarnya ganti kerugian dalam pembebasan hak atas tanah ?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah, khususnya mengenai aspek kepentingan umum dan dasar penetapan besarnya ganti kerugian di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekundair.

Sumber data dalam penelitian ini adalah di samping dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan yang terkait

dengan penelitian ini. Selain itu juga berasal dari penjelasan atau keterangan pejabat yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara langsung atau dengan memberikan daftar pertanyaan kepada pejabat yang terkait dengan penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul dikaji dengan menggunakan metode interpretasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum pertanahan di Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah belum adanya batasan pengertian yang tegas tentang kepentingan umum dalam pembebasan hak atas tanah, sehingga akan menimbulkan perbedaan penafsiran menurut kepentingannya masing-masing, dan pelaksanaan pembebasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sering tidak mencapai mufakat dalam musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti kerugian.

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah perlu segera diupayakan pemouatan Undang-undang tentang Hak Milik Atas Tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh UUPA dan perlu adanya peningkatan hierarkhi peraturan dan penyempurnaan substansinya mengenai pembebasan hak atas tanah, yaitu dalam bentuk undang-undang. Di samping itu, para pihak yang terkait dalam pembebasan hak atas tanah menyadari kedudukannya masing-masing terhadap fungsi sosial hak atas tanah. Hendaknya masing-masing pihak tidak memaksakan keinginannya sendiri yang semata-mata menguntungkan dirinya sendiri.